

MEMANTAU TOPONIMI DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

Oleh
Yusron Halim*

ABSTRACT

Publications on toponymy in Indonesia are still small in number. The term toponymy has not been widely known by the society, although the problems that can be observed are among others: inaccuracy in providing geographical names, change in spelling, a great number of local languages, change in names in foreign languages into Indonesian, all of which have given rise to various difficulties, obstacles or confusion in identifying geographical features. In this paper stress is placed on the basic concept of toponymy and the problems of geographical names in Indonesia in the framework of national standardization.

INTISARI

Tulisan tentang toponimi di Indonesia masih belum banyak, bahkan istilah toponimi inipun belum banyak dikenal dalam masyarakat, walaupun permasalahannya sudah lama dirasakan. Tidak tepatnya pemberian nama-nama geografi, adanya perubahan tulisan, banyaknya bahasa daerah, ataupun perubahan nama dari yang berbahasa asing ke bahasa Indonesia, menyebabkan timbulnya bermacam-macam kesulitan, hambatan atau kebingungan dalam mengenali kembali kenampakan-kenampakan geografi. Penekanan dalam tulisan ini adalah uraian pengertian dasar tentang toponimi dan permasalahannya yang menyangkut nama-nama geografi di Indonesia dalam menuju pembakuan nasional.

PENDAHULUAN

Toponimi adalah suatu studi tentang nama-nama tempat (nama-nama geografi) yang diberikan pada kenampakan-kenampakan fisik dan kultural, seperti nama-nama kota, sungai, gunung, teluk, pulau, kampung, tanjung, danau, dataran dan lain sebagainya.

*
Drs. Yusron Halim :
- Lektor dalam Kartografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Participant in U.N. Training Course in Toponymy, Cisarua - Bogor, 1982.

Semua nama tersebut diperlukan untuk pemetaan dan penulisan dokumen, sehingga si pemakai dapat dengan mudah mengenali kembali objek tersebut.

Timbulnya istilah toponimi (toponymy) disebabkan adanya kesulitan, hambatan dan kebingungan dalam menulis nama-nama geografi, baik untuk tujuan pemetaan ataupun untuk tujuan penulisan dokumen. Permasalahan tersebut sebetulnya sudah lama dirasakan tidak saja oleh para pakar kartografi dan geografi saja, tetapi juga oleh para pakar lainnya seperti para pakar sosial-ekonomi, statistik, bahasa, penyensus, perencana dan masyarakat pada umumnya.

Peta adalah salah satu sumber data dan informasi di samping dokumen lainnya. Kalau tidak ada keseragaman dalam pemberian nama-nama geografi tentu akan menimbulkan masalah yang luas. Oleh karena itu perlu pembakuan nama-nama geografi.

Usaha ke arah pembakuan nama-nama geografi sebenarnya sudah lama dilakukan terutama di negara-negara maju oleh para pakar berbagai disiplin ilmu antara lain oleh para pakar geografi, kartografi, statistik, pelaksana sensus dan perencana. Akan tetapi usaha menuju pembakuan ini ternyata banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Di Indonesia masih belum ada pembakuan nama geografi, sehingga usaha menuju kearah penyelesaian masalah tersebut sangat dinantikan. Hal ini nampak bahwa Indonesia telah membuka pintu bagi badan internasional The United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN) pada tahun 1979 melalui BAKOSURTANAL untuk melaksanakan kursus toponimi (Pilot Training Course in Toponymy) pada Juni 1982 di Cisarua, Bogor. Kemudian tahun 1988 disusul dengan seminar di Cibinong, Bogor dalam usaha membakukan nama geografi di Indonesia.

Kursus toponimi oleh BAKOSURTANAL tersebut disponsori juga oleh The United Nations Cartographic Section (UNCS), The United Nations Group of Experts on Geographical Asia, South-East Pasific and South-west Division. Peserta kursus sebanyak 22 orang yang datang dari negara-negara Asia-Pasifik seperti Malaysia, Pilipina, Thailand dan Indonesia. Staf pengajar, materi kursus dan informasi untuk keperluan kursus diberikan oleh pakar toponimi yang ternama seperti: Dr.R.B.Bohme (Rep.Fed.Jerman), Dr.E.Foldi (Hongaria), Dr.H.A.G.Lewis (Inggris), Dr.D.P.Blok (Belanda), Prof.F.J.Omerling (ITC Belanda), Mr.A.N.Taylor (USA), Mr.Don Pearce (Australia), Mr.Fadzil (UNGEGN Asia), Prof.Jacub Rais (Indonesia) dan Prof.Dr.I Made Sandy (Indonesia). Tujuan kursus adalah memberikan pengetahuan dasar tentang toponimi, cara mengenali permasalahan dan mengatasinya, pengumpulan data di lapangan, eksonim, generik, dan gazetter serta cara menuju ke arah pembakuan.

Dalam membicarakan nama-nama geografi baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional tidak lepas dari masalah bahasa. Disadari bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, akan tetapi diciptakan manusia untuk memberikan lambang pada setiap obyek yang ditemukan di sekelilingnya, dan sesuatu yang terjadi ketika ia mencoba berhubungan dengan masyarakat bangsa dan negara yang dikembangkan dengan kekuatan nalar dan rasa. Hasil perkembangan nalar dan rasa yang didorong oleh kehendak yang terjadi dalam diri manusia untuk memberikan identitas terhadap alam, khususnya topografi yang langsung dapat dilihat. Hal ini nampaknya merupakan ciri setiap orang, suku, atau bangsa pada setiap daerah.

TOPONIMI DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

Toponimi di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau yang letaknya tersebar, dengan penduduk yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki peradaban seras budaya yang beraneka ragam termasuk bahasanya. Sekitar 5.000 pulau belum bernama. Kondisi semacam ini cukup menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan dalam toponimi. Berkaitan dengan uraian tersebut, maka beberapa permasalahan nama geografi perlu mendapat perhatian, antara lain nama obyek, terjemahan nama dari nama berbahasa asing, penyesuaian nama dengan ejaan baru, cara penempatan nama geografi dalam peta, generalisasi kenampakan geografi yang berkaitan dengan tujuan pemetaan dan skala peta.

Suku Bangsa dan Bahasa Daerah di Indonesia

Bahasa daerah di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok bahasa daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok Bahasa Melayu-Polinesia terdiri atas lingkungan bahasa : (a) Sumatera yang meliputi bahasa-bahasa daerah Aceh, Batak, Gayo, Minangkabau, Melayu, Lampung, Nias, Mantawai, (b) Jawa yang meliputi bahasa-bahasa daerah Sunda, Jawa, Madura, (c) Kalimantan yang meliputi bahasa-bahasa daerah Kalimantan dan yang tidak berbahasa Melayu, (d) Bali, Sasak dan Sumbawa yang meliputi bahasa-bahasa daerah Bali, Sasak, Sumbawa, (e) Filipina, (f) Gorontalo, (g) Tomini, (h) Toraja, (i) Loinang dan Banggai, (j) Bungku Laki, (k) Sulawesi Selatan, (l) Muna-Butung, (m) Bima-Sumba, (n) Ambon-Timor, (o) Sula-Bacan, (p) Halmahera Selatan.
2. Kelompok Bahasa Halmahera Utara, Irian Jaya.
3. Kelompok Bahasa-Bahasa Irian.

Kelompok bahasa Melayu-Polynesia merupakan kelompok bahasa yang dominan di Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kesatuan ternyata banyak dipengaruhi oleh kelompok bahasa Melayu-Polynesia. Kondisi semacam ini tentu menimbulkan banyak masalah terutama yang berkaitan dengan nama geografi antara lain masalah: (i) ejaan, (ii) ucapan, (iii) intonasi, (iv) nama setempat dan (v) kesamaan nama yang terdapat di berbagai tempat di Indonesia.

Berikut dapat dilihat contoh-contoh perubahan: (i) **ejaan**: Ujungpandang -- Jup pandang, Makasar -- Makassar, Yogyakarta -- Ngayogyakarta, Soe -- Su, (ii) **ucapan**: Surabaya -- Suroboyo, Kartasura -- Kartosuro, Salatiga -- Solotigo, Dieng -- Diyeng, (iii) **intonasi**: Makasar -- Makas'sar, Rapang -- Rap'pang, Taka - - Tak'ka, Pabiring -- Pab'biring, (iv) **nama lokal**: (a) **Air/Sungai**: Aek, Batang (Sumbar), Noil, Lowo, (Flores), Ake, Nguai (Halmahera), Meta (Wetar), Suak, Alur (Aceh), Bah (Sumut), Lahar, Way (Sulawesi), Oil, Mota (Timor), Brang, Kokar (Sumbawa), Pangkung, Yeh (Bali), Ci (Jawa Barat), Lubuk, Liu, Selat (Kalimantan), Curah (Jawa Timur), Weru, Yer, Ger (Irian Jaya), Idano (Nias), Sunge, Luku (Sumba), Jar (Pantar), Tulung (Sulawesi Selatan), Kokok (Lombok), Waiyan (Seram), Lao (Tapanuli); (b) **Tanjung**: Buku (Timor), Nunu (Wetar), Ngalu (Flores), Tubun (Tanimbar), Tano (Sumbawa), Tando (Sulawesi), Ture (Nias), Tutun

(Irian, Wetar); (c) **Rawa:** Debu, Kolam (Timor), Lura (Sulawesi), Rawah (Palembang), Rawang (Riau); (d) **Pulau:** Busung, Gili (Lombok), Gosong (Kalimantan), Mios (Irian), Nusa, Nus (Riau), Yep, Yus (Irian); (e) **Kampung:** Babakan (Jawa Barat), Banchah (Sumatera Barat), Banjar (Bali, Riau), Bone (Sulawesi), Gampong (Aceh); (f) **Telaga:** Balang (Sulawesi), Danau, Kobak (Kalimantan), Laut (Aceh), Situ (Jawa Barat), Tasik (Sumatera), Wutun (Timor, Flores); (g) **Teluk:** Ayiko (Halmahera), Jiko (Sulawesi), Labuhan, Legon (Jawa Barat), Lhok (Aceh), Lempong, Loho (Flores); (h) **Gunung:** Adian (Tapanuli), Bulu, Buntu (Sulawesi), Bur (Gayo), Cot (Aceh), Doro (Sumbawa), Dede (Timor), Dolok, Deleng (Tapanuli), Guguk (Jambi), Gumuk (Jawa Tengah); (v) **kesamaan nama di beberapa tempat:** Karanganyar dijumpai di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan; Ketapang di Lampung, Kalimantan barat dan Jawa Timur; Kotabaru di Kalimantan Selatan dan Bali; Kubu di Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera dan Riau; Sukorejo di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dari beberapa contoh tersebut di atas jelas nampak betapa banyak dan beragamnya nama geografi yang diberikan oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Sudah barang tentu hal tersebut mengundang pertanyaan bagaimana membakukan nama-nama yang berasal dari daerah ini. Apakah dapat dipakai sebagai nama resmi atau tidak.

Nama tempat atau toponimi yang merupakan nama suatu bentuk atau sebagian bentuk fisik atau tempat pemusatan penduduk seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya atau Medan merupakan nama tempat yang paling sederhana. Contoh lain adalah nama-nama gabungan (compound names), yang merupakan nama-nama tambahan pemberi keterangan (generic names) pada kenampakan fisik yang bersifat deskriptif, seperti Gunungsewu (DIY, Jawa Tengah), Bukit Barisan (Sumatera). Ada nama yang memberikan identitas (khas) pada kenampakan geografis seperti Pulau Pandan untuk nama pulau yang banyak tanaman pandan, Gunungkidul untuk nama daerah yang terletak dibagian selatan DIY, Kalibening untuk sungai yang airnya jernih (bening) dan lain sebagainya. Sering juga dijumpai nama generik yang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti Kaliurang, tidak lagi dijumpai udang (urang) di sungainya. Namun ada pula pemberian nama yang salah kaprah seperti nama kota Great Fall tidak disebut dengan Water Fall.

Kesalahan dalam pemberian nama-nama geografi dapat juga terjadi secara menyeluruh atau sebagian; mungkin nama itu salah, atau nama itu benar tulisannya juga benar, tetapi dalam ucapannya salah atau tulisannya sama sekali salah. Mungkin juga pemberian namanya didasarkan pada nilai sejarah (historical significance) atau pernah mempunyai kejadian khusus seperti Battle Mountain, Lost Boys.

Perubahan Nama-Nama Geografi

Mendasarkan pada kenyataan beranekaragamnya nama suatu kenampakan serta banyaknya perubahan nama seperti telah dikemukakan di atas, maka diperlukan perhatian yang serius dan suatu pedoman pembakuan. Pada contoh berikut perubahan-perubahan nama geografi dapat dikelompokkan sebagai berikut : (i) **perubahan yang dipaksakan (corrupted names)** : Tjipinang vredebel -- Cipinang Cempedak, Padang Baai -- Padangbai, Alkmaar Island -- Pulau Damar; (ii) **perubahan dengan tidak terikat (no conterpart)**: Vlaming Strait -- Sulawesi Tenggara, Java's Eerste Punt -- Jawa Barat,

Polonia -- Medan; (iii) perubahan terikat (with conter part): Batavia -- Jayakarta -- Jakarta, Buitenzorg -- Bogor, Meerster Cornelis -- Jatinegara, For de Kock -- Bukittinggi, (iv) perubahan dengan terjemahan (translation): Schildpaddenbaai -- Teluk Penyu, Peperbaai -- Teluk Lada, Kleine Sunda eilanden -- Kepulauan Sunda Kecil, Duizend eilanden -- Kepulauan Seribu, (v) perubahan secara sepihak (unilaterally decided names): Indian Ocean -- Samudera Indonesia, New Guinea -- Irian Jaya, Borneo -- Kalimantan, (vi) perubahan huruf ejaan: Djakarta -- Jakarta, Tjirebon -- Cirebon, Surabaya -- Surabaya, (vii) perubahan nama: Puncak Soekarno -- Puncak Jayawijaya.

Untuk menulis nama geografi yang berbahasa asing (bukan bahasa Indonesia) perlu suatu pedoman yang mendasar, tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengubah ejaannya, apakah akan mendasarkan bunyi ucapan penduduk setempat, atau bunyi ucapan dalam bahasa Indonesia, seperti contoh berikut Papua New Guinea -- Papanugini, Mexico City -- Meksikositi, Thailand -- Tailen, New York -- Nyuook.

Memperhatikan beberapa contoh tersebut di atas, nampaknya orang masih bebas menentukan nama geografi yang masih berbahasa asing, apakah tetap dibiarkan saja sebagaimana ejaan aslinya atau diubah sesuai dengan bunyi ucapan bahasa Indonesia.

PEMBAKUAN NASIONAL

Kesalahan penulisan nama geografi di dalam peta atau di dalam dokumen yang merupakan sumber untuk berbagai kepentingan dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan atau membingungkan dalam kegiatan sosial ekonomi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan pembakuan nasional maupun internasional nama geografi.

Pembakuan nasional nama geografi terutama ditujukan untuk kepentingan negara, di samping juga merupakan bahan masukan yang sangat penting untuk menuju pembakuan internasional. Pada tahun 1973 kongres International Geographical Union (IGU) telah mengeluarkan suatu resolusi agar setiap negara mempunyai suatu dasar pembakuan nasional. Kemudian resolusi yang sama dicetuskan lagi pada pertemuan IGU berikutnya. Hingga saat ini baru sebagian kecil negara yang telah mempunyai suatu badan nama geografi nasional, bahkan sebagian besar belum mempunyai program pembakuan nasional, sehingga pembakuan internasional belum dapat dimulai.

Indonesia sampai saat ini belum membentuk suatu badan atau komisi nasional nama geografi yang mempunyai otoritas dalam menetapkan pembakuan termasuk pembakuan eksponim (exonym), petunjuk pelaksanaan transliterasi maupun transkripsi nama geografi di Indonesia. Belum adanya pembakuan nama geografi menjadi tantangan bagi para pakar kartografi, geografi, statistik, bahasa, petugas sensus, perencana dan peneliti untuk bersama-sama memikirkan dan berusaha memperoleh suatu pedoman untuk membakukan nama geografi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan harapan temu pendapat di Cibinong bulan September 1988. Bahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengumumkan bahwa mulai tahun ajaran 1988/1989 Atlas Indonesia untuk Sekolah Dasar sudah harus dipakai sebagai pedoman bagi murid.

Dalam kaitannya dengan masalah di atas faktor skala peta dan tujuan penggunaan peta perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh nama geografi untuk peta skala besar jauh lebih rinci dibanding dengna peta skala kecil. Pemberian nama geografi untuk kepentingan

murid Sekolah Dasar harus sama taat asas dengan yang untuk kepentingan lainnya, agar tidak membingungkan mereka di kemudian hari.

Langkah pertama ke arah tersebut adalah melakukan inventarisasi nama-nama geografi di Indonesia. Untuk keperluan itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Dalam pengumpulan data nama harus diperoleh informasi selengkap mungkin tentang: (a) tulisan, ucapan dan artinya menurut penduduk setempat; (b) tulisannya dalam buku kadastral dan registrasi; (c) tulisan-tulisan sekarang, dulu dalam peta kuno dan sumber sejarah lainnya; (d) tulisannya dalam buku administrasi setempat.
- ii. Badan yang berwenang harus mempunyai rekaman bunyi ucapan lokal dan ejaan tulisannya.
- iii. Karakter, tingkat jangkauan, arti dan posisi penamaan suatu kenampakan harus jelas batasannya.
- iv. Bilamana mungkin sedikitnya ada dua sumber lokal yang bebas.

Untuk memberi sumbangsaran nama geografi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (a) menghindari perubahan nama, (b) menghindari penggunaan nama orang, (c) menghindari perbedaan pemberian nama dari rincian suatu kenampakan yang sama ujudnya, misalnya nama anak sungai berbeda dengan sungai induknya, (d) menghindari kombinasi huruf yang berbeda, (e) menghindari nama rangkap/pengulangan, misalnya sungai Cili wung, Sungai Bengawan Solo, (f) mengadakan konsultasi dengan badan-badan yang berwenang untuk pengadaan/pengusulan nama-nama baru, dengan mempertimbangkan penggunaan nama yang tepat dan ejaan yang benar.

KESIMPULAN

Untuk menunjang pemecahan masalah-masalah toponimi, perlu dimulai inventarisasi nama-nama geografi melalui suatu penelitian. Sedangkan untuk menuju ke arah pembakuan nasional nama geografi perlu adanya suatu badan resmi nasional yang beranggotakan berbagai pakar antara lain para pakar kartografi, geografi, bahasa, statistik, perencana wilayah dan lainnya. Badan resmi ini segera menetapkan suatu pedoman dasar untuk pembakuan nama-nama geografi yang mudah digunakan. Di samping itu perlu adanya usaha pengembangan toponimi melalui jalur pendidikan, kursus atau seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohme, R., 1980. Office Treatment of Names-General Problems and Automatic Data Processing. UNT Course in Toponymy. Cisarua-Bogor.
- Foldi, E., 1982. Name Authorities in Hungary. Course in Toponymy. Cisarua-Bogor.
- Ormeling, F.J., 1982. This Information on Geographical Names was Extracted from the US Geological Survey Publication. maps for Africa.
- Ormeling, F.J., 1982. Writing Systems. Course in Toponymy. Cisarua-Bogor.
- Ormeling, F.J., 1982. Classification and Global Distribution of Languages.
- Ormeling, F.J., 1982. The Mosaic of Languages.

- Ormeling, F.J.,(Sr), 1980. Exonyms: An Obstacle to International Communication. *ITC Journal 1*: 162-175.
- Ormeling, F.J., 1982. United Nation Activities on Standardization of Geographical names.
- Rais, Jacob, 1987. Masalah Nama-Nama Geografi di PBB. *Warta Survey & Pemetaan*, II (1,2).
- Raybun, A., 1972. Characteristics of Toponymic Generics in New Brunswick, Us Presses de l'Universite Laval Quebec, Canada, 16 (38).
- Richard, R., 1980. United Staes Board on Geographic Names, An Agency Established by Law to Serve, The US Government and The Public.
- Sandi, I Made, 1982. Geographic Names Indonesia. Course in Toponymy, Cisarua-Bogor.
- Taylor, A., 1982. The Role of Office Procedures in The Standardization of Geographical Names. Course in Toponymy. Cisarua-Bogor.
- UN.TCT., 1982. Technical Terms in Toponymy.

